

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

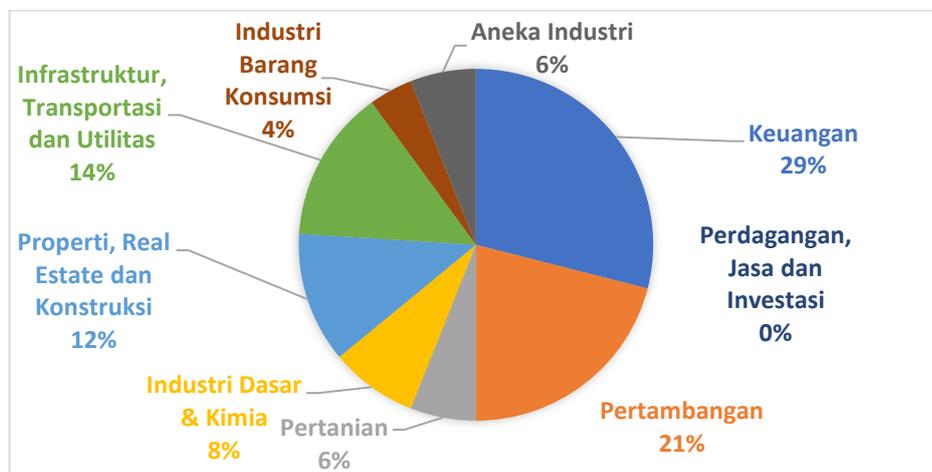
Perusahaan publik menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) ialah perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh tiga ratus pemegang saham dan telah mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah atau jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan peraturan pemerintah. Perusahaan publik di Indonesia untuk melakukan penjualan efek perusahaannya di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia berperan sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan yang terdaftar di pasar modal, melalui berbagai kegiatan perdagangan instrumen, seperti saham, *derivative*, dan instrumen lainnya (Tandelilin, 2010).

Objek dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keberlanjutan dengan durasi penelitian selama lima tahun dari 2016-2020. Total perusahaan yang terdaftar di laman Bursa Efek Indonesia pada tahun ialah Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Perusahaan (BEI, 2021), yang digolongkan menjadi dua belas sektor emiten yaitu sektor energi, sektor bahan baku, sektor perindustrian, sektor konsumen primer, sektor konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan *real estate*, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, serta sektor produk investasi tercatat (Sidik, 2021). Namun hanya terdapat tiga puluh empat perusahaan publik yang melakukan penerbitan laporan keberlanjutan.

Dengan adanya peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik memiliki tanggung jawab untuk menerapkan laporan keuangan yang bersifat berkelanjutan terutama perusahaan yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan. Diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia terutama di bidang jasa keuangan. Ditetapkannya peraturan ini, menggambarkan bahwa pentingnya laporan keberlanjutan terhadap keberlangsungan bisnis masa depan yang

berkelanjutan, karena dalam laporan keberlanjutan menampilkan informasi tentang keselarasan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, yang dinilai dengan *Global Reporting Initiative (GRI)*. Standar penilaian laporan keberlanjutan dengan *Global Reporting Initiative (GRI)* sesuai dengan *Sustainability Report Guidelines* yang disusun oleh *Global Sustainability Board*.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur kewajiban perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan bisnisnya berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas. Peraturan ini mewajibkan bagi perseroan terbatas untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan gambaran laporan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 tentang presentase perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang melakukan penerbitan laporan keberlanjutan, berdasarkan sektornya:



**Gambar 1. 1 Persentase Pengungkapan Laporan Keberlanjutan per Industri Pada Tahun 2017**

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017*

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa 29% yang menerbitkan laporan keberlanjutan merupakan industri keuangan. Industri keuangan merupakan industri yang tertinggi dalam melakukan publikasi laporan keuangan dibandingkan dengan

industri lainnya. Publikasi laporan keberlanjutan merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan layanan keuangan untuk dapat menerbitkan laporan keberlanjutan, sehingga tingkat penerbitan laporan keberlanjutan oleh industri keuangan menjadi tinggi. Sementara industri perdagangan dan jasa investasi menjadi industri yang paling sedikit dalam melakukan pengungkapan terhadap laporan keberlanjutan.

Pemilihan perusahaan publik sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pengungkapan terhadap aspek keuangan dan seluruh kegiatan perusahaan secara sistematis dan kredibel. Sehingga kecenderungan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penerbitan laporan keberlanjutan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non publik. Perusahaan publik cenderung mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dikarenakan dalam kepemilikan sahamnya terdapat dana publik, sehingga tanggungjawab perusahaan publik terhadap masyarakat lebih besar dibandingkan dengan perusahaan non publik. Berdasarkan data yang diolah penulis, hanya terdapat 9% perusahaan publik yang melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan pada tahun 2017 dan hanya 5% perusahaan publik yang secara konsisten melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan dari 2016-2017.

## **1.2 Latar Belakang**

Laporan keberlanjutan ialah suatu laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan dan mengkomunikasikan kepada *stakeholders* mengenai kinerja perusahaan dalam lingkup lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang bersifat baik dan terbuka (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Pengungkapan laporan keberlanjutan memiliki manfaat untuk dapat mengetahui tentang informasi aktivitas perusahaan, bukan hanya dalam aspek ekonomi, namun juga dalam aspek lingkungan dan sosial, agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 1 Ayat 3) yang menyatakan bahwa pembangunan keberlanjutan ialah upaya untuk menyelaraskan

aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam rencana pembangunan untuk kepentingan masa depan.

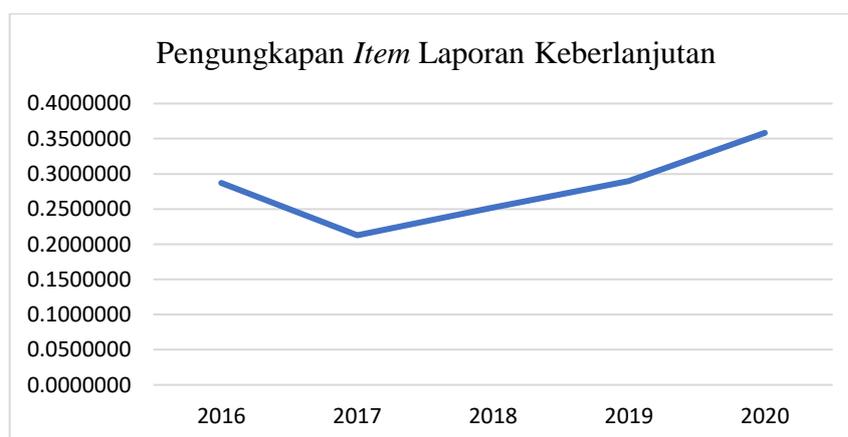
Seiring dengan perkembangan pola bisnis, keberlanjutan sudah menjadi suatu hal yang penting dan diperhatikan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan semakin pentingnya keselarasan antara bisnis dan lingkungan. Dengan adanya hal ini, menjadikan perusahaan bukan hanya memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham (*shareholders*), namun juga kepada seluruh masyarakat (*stakeholders*). Melalui laporan keberlanjutan, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan pengawasan kepada komitmen perusahaan atas keberlangsungan sosial dan lingkungan, bukan hanya terhadap aspek ekonomi.

Kepedulian perusahaan terhadap tiga aspek keberlanjutan yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial sudah mulai menunjukkan peningkatan, bukan hanya terhadap aspek ekonomi, namun secara keseluruhan, hal ini dikarenakan semakin besarnya dorongan dari pemerintah dan masyarakat terhadap perusahaan untuk dapat peduli dengan ketiga aspek keberlanjutan, karena dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan memiliki dampak secara positif atau negatif terhadap terhadap masyarakat. Melalui laporan keberlanjutan dapat menjadi sebuah media komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap ketiga aspek keberlanjutan tersebut, sehingga dapat diketahui komitmen perusahaan dalam menjalankan aspek keberlanjutan dalam bisnisnya. Dalam perkembangannya investor memiliki peranan yang sangat penting dalam menekan perusahaan untuk peduli terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang dapat ditunjukkan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial, hal ini karena investor cenderung memilih melakukan investasi terhadap perusahaan yang peduli terhadap sosial dan lingkungan (Flammer, 2013).

Setiap perusahaan perlu melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan dengan baik, sehingga laporan keberlanjutan dan laporan keuangan akan menjadi laporan yang terintegrasi. Berdasarkan fakta yang didapatkan berdasarkan survei *EY Global Institutional Investor* pada tahun 2015 terhadap lebih dari 200 investor

institusional menunjukkan bahwa mereka semakin sering mempergunakan laporan yang bersifat non-keuangan milik perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi yang mereka lakukan (CRMS Indonesia, 2021). Hasil dari survei tersebut, semakin memperkuat argumen bahwa laporan keberlanjutan merupakan komponen penting bagi perusahaan dan para *stakeholder*, bahkan laporan keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan dapat menjadi gambaran pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

Penelitian ini menggunakan standar *Global Reporting Initiative (GRI) G4* yang pada pedoman ini menggunakan sembilan puluh satu indikator penilaian terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Namun, terdapat permasalahan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang terjadi pada perusahaan publik pada periode 2016-2020, hanya sedikit perusahaan publik yang melakukan penerbitan laporan keberlanjutan secara konsisten dan melakukan pengungkapan sesuai standar GRI G4. Berdasarkan data yang diolah oleh penulis hanya terdapat dua puluh delapan dari Tiga Ratus Dua Puluh Delapan perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan dan melakukan pengungkapan sesuai standar GRI G4 tetapi belum secara penuh. Berikut pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan publik pada periode 2016-2020.



**Gambar 1. 2 Rata-Rata Pengungkapan Item Laporan Keberlanjutan 2016-2020**

*Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)*

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi terhadap rata-rata pengungkapan item pada laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan publik pada tahun 2016 hingga 2020. Dengan rata-rata pengungkapan sebesar 0,2799058 atau sekitar 25 item dari total 91 item yang seharusnya diungkapkan sesuai dengan standar GRI G4. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan publik pada tahun 2016-2020 masih sangat rendah. Terdapat peningkatan tren pengungkapan item laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan publik pada tahun 2018 hingga tahun 2020, dengan rincian rata-rata ialah 2018 sebesar 0,2519623, tahun 2019 sebesar 0,2896389, dan tahun 2020 sebesar 0,3583203. Tren peningkatan ini terjadi dikarenakan tekanan yang semakin besar setiap tahunnya terhadap perusahaan publik untuk melakukan kegiatan bisnis berbasis berkelanjutan, selain itu terbitnya peraturan oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51 Tahun 2017 yang ditunjukkan kepada seluruh perusahaan publik terutama yang bergerak di bidang keuangan untuk dapat melakukan pengungkapan dan penerbitan laporan keberlanjutan secara baik, agar terbentuknya keuangan berkelanjutan. Namun dengan adanya tren positif karena peraturan tersebut, pengungkapan laporan keberlanjutan oleh perusahaan publik masih cenderung minim dengan hanya terdapat 28 perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan dari tahun 2016-2020, jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Beberapa perusahaan yang sudah menerbitkan laporan keberlanjutan secara konsisten pada tahun 2016-2017 masih memiliki kasus tentang isu keberlanjutan, seperti kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk pada tahun 2020 di Tuban yang diakibatkan oleh aktivitas peledakan tambang (Junaidi, 2020). Kasus lainnya ialah pengrusakan habitat terumbu karang dan ikan yang dilakukan oleh PT Antam Tbk pada tahun 2021 di Halmahera Timur yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan perusahaan (Prabowo, 2021).

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut, diketahui bahwa masih minimnya pengungkapan laporan keberlanjutan secara konsisten yang dilakukan oleh

perusahaan di Indonesia dan perusahaan yang melakukan pengungkapan terhadap laporan keberlanjutan belum tentu juga mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sudah sepenuhnya berkomitmen terhadap keberlanjutan. Perusahaan seperti PT Antam Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang secara konsisten mengungkapkan laporan keberlanjutannya setiap tahun, namun belum sepenuhnya mengimplementasikannya secara nyata. Perusahaan dituntut untuk lebih bertanggungjawab terhadap seluruh dampak dari aktivitas bisnisnya dan lebih peduli dengan keberlangsungan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Terlepas dari adanya kasus kerusakan lingkungan dan tata kelola yang buruk dari berbagai perusahaan yang sudah melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan, perusahaan tersebut sudah lebih memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis berkelanjutan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan laporan keberlanjutan. Hal ini bertujuan untuk dapat memperbaiki dan terkontrolnya dampak negatif dari kegiatan bisnis perusahaan, sehingga dapat terciptanya bisnis yang berkelanjutan (Hidayat, 2019). Berikut ini beberapa penelitian yang terkait dengan laporan keberlanjutan.

*Board Diversity* merupakan suatu isu yang banyak berkembang terhadap *good corporate governance* pada suatu perusahaan terutama di Indonesia, hal ini membahas tentang ketimpangan penempatan posisi wanita didalam jabatan tertinggi didalam suatu perusahaan. Kurangnya penempatan wanita di jabatan tertinggi disuatu perusahaan karena pandangan berbeda yang ditujukan terhadap pria dan wanita dalam mencapai suatu kesuksesan (Kusumastuti et al., 2019). Dalam kenyataannya, kehadiran dari wanita didalam posisi dewan perusahaan dapat memberikan sudut pandang baru dan heterogenitas didalam pengambilan keputusan dalam perusahaan (García-Sánchez et al., 2019). Sifat dari seorang wanita yang lebih berhati-hati dan meminimalisir risiko, dapat menjadi faktor pendorong perusahaan dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan, sehingga perusahaan tersebut akan memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan dengan baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Majidah & Muslih (2019) menyatakan bahwa direktur wanita berpengaruh

terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Shamil et al. (2014) menyatakan bahwa direktur wanita tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Harga saham ialah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terjadi karena adanya penawaran jual dan permintaan beli atas efek yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2021). Besar atau kecilnya suatu harga saham terjadi karena adanya pertemuan antara penjual dan pembeli atas efek dari suatu perusahaan, ketika pasar tidak meminati saham yang diperjual belikan di bursa, maka akan menyebabkan harga saham suatu perusahaan akan kecil, sementara jika peminat terhadap saham suatu perusahaan tinggi, maka harga saham suatu perusahaan akan besar. Cara pandang investor dan pemegang yang saham terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan yang berbahaya terhadap lingkungan cenderung negatif, sementara terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan yang ramah lingkungan memiliki kecenderungan positif (Flammer, 2013). Cerminan stigma negatif yang ditunjukkan terhadap perusahaan yang tidak peduli dengan keberlangsungan lingkungan, dapat mempengaruhi perusahaan melalui harga saham yang tidak baik. Agar perusahaan mendapatkan stigma positif dari masyarakat yang berdampak terhadap harga saham perusahaan yang baik, maka perusahaan akan lebih berkomitmen untuk dapat melakukan pengungkapan terhadap laporan keberlanjutannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasanudin & Suryani (2019) menyatakan bahwa harga saham berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Kepemilikan saham publik ialah kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau institusi, diluar hubungan dengan manajerial perusahaan (Ramdhani, 2019). Dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat atau institusi diluar manajerial, maka akan membuat segala keputusan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, akan diamati oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kepemilikan saham publik akan memiliki kecenderungan untuk memperhatikan faktor sosial dan lingkungan, hal ini dikarenakan dorongan dari masyarakat yang lebih besar kepada perusahaan publik,

sehingga perusahaan tersebut akan melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lamia et al. (2014) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Syafira (2020) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan (Ramdhani, 2019). Ukuran perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap total aset perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan maka semakin besar juga tanggungjawab perusahaan tersebut kepada *stakeholders* sehingga perusahaan tersebut lebih mempedulikan tentang pengungkapan laporan keberlanjutan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dissanayake et al. (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Meutia (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/PJOK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab terhadap dewan komisaris yang membantu pelaksanaan tugas dari dewan komisaris. Komite audit berisikan minimal tiga orang yang berasal dari komisaris independent dan pihak eksternal perusahaan. Komite audit memiliki peranan untuk memastikan bahwa segala sesuatu hal yang dilakukan oleh perusahaan sudah tepat dan memberikan saran secara independen terhadap dewan komisaris. Suatu perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang lebih besar, akan melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dengan lebih baik terutama dalam hal keberlanjutan, hal ini dikarenakan komite audit akan memberikan dorongan agar manajemen perusahaan melakukan pengungkapan terhadap tanggungjawab sosialnya terbuka. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Josua

dan Septiani (2020) menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin & Suryani (2019) menyatakan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini ialah karena terdapat inkonsistensi dan minimnya penelitian yang dilakukan terhadap variabel *board diversity*, harga saham, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan dan jumlah komite audit atas pengungkapan laporan keberlanjutan. Berdasarkan fenomena penelitian tersebut dan masih dijumpai inkonsistensi terhadap hasil penelitian terdahulu, sehingga masih relevan untuk melakukan penelitian terhadap “Pengaruh *Board Diversity*, Harga Saham, Kepemilikan Saham Publik, Ukuran Perusahaan dan Jumlah Komite Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Laporan keberlanjutan merupakan media komunikasi yang tepat untuk dapat menggambarkan transparansi perusahaan atas seluruh kegiatan perusahaan dan pertanggungjawaban atas aspek keberlanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51/PJOK 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emisioner, dan Perusahaan Publik. Dengan adanya peraturan tersebut dan semakin besarnya tekanan yang diberikan oleh pemangku kepentingan, seharusnya membuat perusahaan publik akan semakin patuh untuk menerbitkan laporan keberlanjutan. Namun, dalam kenyataannya hanya sekitar Dua Puluh Delapan dari Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan penerbitan laporan keberlanjutan secara konsisten dan sesuai dengan standar GRI G4 pada periode 2016-2020. Walaupun rata-rata item pengungkapan pada laporan keberlanjutan sudah meningkat setiap tahunnya, namun nilai rata-rata tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan total item yang seharusnya diungkapkan. Minimnya pengungkapan terhadap laporan

keberlanjutan yang dilakukan ini menunjukkan bahwa perusahaan publik masih lalai dan belum sepenuhnya berkomitmen dalam mengimplementasikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 51/PJOK 03/2017 tentang keberlanjutan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap pengaruh *board diversity*, harga saham, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan dan jumlah komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, masih terdapat sejumlah inkonsistensi terhadap hasil penelitian terdahulu dan masih minimnya penelitian terhadap pengaruh beberapa faktor seperti *board diversity* dan harga saham. Sehingga masih relevan untuk melakukan penelitian tentang pengaruh beberapa faktor tersebut terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan pada periode 2016-2020.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penulis memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *board diversity*, harga saham, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan dan jumlah komite audit dan pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- 2) Apakah *board diversity*, harga saham, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan dan jumlah komite audit berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- 3) Apakah *board diversity* memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- 4) Apakah harga saham memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- 5) Apakah kepemilikan saham publik memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

- 6) Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
- 7) Apakah jumlah komite audit memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui *board diversity*, harga saham, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan dan jumlah komite audit dan pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *board diversity*, harga saham, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan dan jumlah komite audit secara simultan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *board diversity* secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh harga saham secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham publik secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

- 7) Untuk mengetahui pengaruh jumlah komite audit secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Sebagai sarana untuk melakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam mengembangkan dan pembaharuan penelitian yang berhubungan dengan laporan keberlanjutan. Dan hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan memperbarui hasil dari penelitian ini, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan laporan keberlanjutan.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Kegunaan praktis yang dapat dicapai berdasarkan hasil penerapan pengetahuan yang terdapat di dalam penelitian ini ialah:

- 1) Bagi perusahaan di Indonesia agar dapat menjadikan hasil dari penelitian ini menjadi gambaran untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam kewajiban perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan secara menyeluruh dan konsisten, sehingga menunjukkan kepedulian perusahaan dalam isu keberlanjutan di Indonesia.
- 2) Bagi Pemerintah Indonesia sebagai regulator agar dapat menjadikan hasil dari penelitian ini untuk menjadi referensi dalam pengembangan peraturan tentang pengungkapan laporan keberlanjutan, agar semakin banyak perusahaan yang peduli dengan keberlanjutan.
- 3) Bagi investor diharapkan dapat menjadikan hasil dari penelitian ini untuk menjadi gambaran dalam penentuan investasi terhadap perusahaan, dimana faktor keberlanjutan menjadi salah satu faktor yang penting sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penyusunan yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini ialah sebagai berikut :

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori dari umum sampai khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, Serta Teknik Analisis Data.

### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek dimulai dari analisis data, diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

### **e. BAB V KESIMPULAN**

Bab ini menjadi penutup pada penelitian, dimana dijabarkan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua pertanyaan penelitian dan juga pada bab ini terdapat saran yang diberikan penulis untuk peneliti selanjutnya.